

STRATEGI PENGEMBANGAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DOBO DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

(Development Strategy of Dobo Fish Auction Place in Aru Islands Regency)

James Abrahamsz^{1,2}, Monalisa C. Lainata^{2*}, Johannes M. S. Tetelepta^{1,2,3,4},
Jesaja A. Pattikawa^{1,2,3,4}, Friesland Tuapetel⁵

¹Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

²Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Program Pascasarjana,
Universitas Pattimura

³Pusat Kemaritiman dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura

⁴Pusat Kolaborasi Riset, Universitas Pattimura - BRIN

⁵Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

Corresponding author: monalisacyndhanitalainata@gmail.com*

Received: 28 Juli 2024, Revised: 7 Oktober 2024, Accepted: 16 Oktober 2024

ABSTRAK: Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, merupakan sentral kegiatan nelayan dengan peluang dan prospek yang baik. Apabila dimanfaatkan dengan semestinya maka TPI ini akan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan nelayan maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam pelaksanaannya, peran kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan TPI Dobo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kelembagaan TPI Dobo, serta memberikan rekomendasi arahan pengelolaan dalam mengelola TPI Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru agar berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari-Mei 2024 di TPI Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan teori fungsi manajemen. Hasil analisa pada indikator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tergolong belum optimal, serta terdapat 3 strategi dari 8 strategi yang merupakan prioritas sebagai arahan pengelolaan TPI Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Kata Kunci: TPI, kelembagaan, pengelolaan, Dobo, Kepulauan Aru

ABSTRACT: The Dobo Fish Auction Place in Aru Islands Regency, is the center of fishermen's activities with good opportunities and prospects if properly utilized, it will make a great contribution to the welfare of fishermen and to the Regional Government. In its implementation, the role of institutions is very important in the management of TPI Dobo. The purpose of this study is to analyze the institutional management of TPI Dobo, as well as provide recommendations for management direction in managing TPI Dobo in Aru Islands Regency so that it is sustainable. This research was carried out from January to May 2024 at TPI Dobo, Aru Islands Regency. The data in this study was collected by observation, interview, and documentation methods. The analysis method used is qualitative descriptive using the management function theory. The results of the analysis on the indicators of planning, organizing, implementation and supervision are not optimal yet, and there are 3 strategies out of 8 strategies that are prioritized as management directions of the Fish Auction Place in Dobo, Aru Islands Regency.



Keywords: Fish auction, institutional, mangement, Dobo, Aru Islands

PENDAHULUAN

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memegang peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan dan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai manfaat yang optimal (Nurwasih, 2021). Tempat pelelangan ikan merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan. TPI menjadi salah satu faktor penggerak dan peningkatan usaha serta kesejahteraan nelayan. Tujuan didirikannya TPI adalah untuk membantu memasarkan hasil tangkapan ikan secara cepat untuk menjaga kualitas ikan, serta melindungi nelayan dari permainan harga tengkulak sehingga membantu nelayan mendapatkan harga ikan yang layak (Suryani, 2020).

Selain untuk membantu nelayan memasarkan hasil tangkapannya, TPI juga didirikan sebagai sarana pemungutan retribusi oleh pemerintah setempat (Sinaga et al., 2020). Dalam hal ini, TPI mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan yakni sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nadia & Suning, 2018) yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 1 Tahun 2022). Berkenaan dengan PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat diolah secara optimal, serta menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang lain yang dibenarkan dalam peraturan yang berlaku sehingga keuangan daerah akan meningkat (Syamsuddin, 2019). Apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan semestinya, maka TPI dapat berkontribusi besar bagi kesejahteraan nelayan maupun pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, peran kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan TPI. Aspek kelembagaan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan perikanan di setiap wilayah pengelolaan perikanan (Abrahamsz, et al., 2018). Pentingnya

kedudukan lembaga tercermin dari dua nilai yang dikandungnya, yaitu sistem nilai atau norma dan organisasi. Kajian penting kelembagaan dalam pengelolaan perikanan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pada kondisi dan penyebab terjadinya (Abrahamsz & Wurlianty, 2015). Dalam konteks dinamika kelembagaan, identifikasi permasalahan dan permasalahan pengelolaan perikanan, serta respon kelembagaan terhadap permasalahan tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan perikanan (Lopulalan & Abrahamsz, 2023).

Kajian tentang TPI telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik dari aspek fungsi dan pengelolaannya (Aji et al., 2016; Rauf & Rachman, 2019; Sinaga et al., 2020), sarana dan prasarana (Nadia & Suning, 2014), retribusi dan PAD (Amirudin, 2014; Berkat & Nusa, 2022), pengembangan (Musoffan & Holis, 2020; Fitri et al., 2021; Crown & Hadiwono, 2023) maupun kelembagaan TPI (Silalahi, 2006; Mardani et al., 2018; Suryani, 2020). Hingga saat ini, tidak ada informasi tentang TPI di Provinsi Maluku.

Salah satu TPI di Provinsi Maluku terletak di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, merupakan sentral kegiatan nelayan dengan peluang dan prospek yang baik. Pemanfaatan TPI apabila dilakukan dengan semestinya maka akan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan nelayan maupun kepada Pemerintah Daerah. Pada awal pengoperasannya, TPI Dobo pernah menjadi primadona bagi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, namun kemudian kontribusinya menurun secara drastis. Sebagai gambaran, retribusi TPI Dobo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2019 adalah sebesar lebih dari Rp. 27 milyar namun menurun drastis hingga di tahun 2023 kontribusinya hanya sekitar Rp. 1 milyar.

Dalam pelaksanaannya, peran kelembagaan sangat penting dalam pengelolaan TPI Dobo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kelembagaan TPI Dobo, serta memberikan rekomendasi arahan pengelolaan dalam mengelola TPI Dobo di

David (2002) menyatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektifnya. Manajemen dapat diuraikan sebagai suatu pendekatan yang logis, sistematis, obyektif untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi. Proses ini berusaha untuk mengkoordinasi informasi kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi yang tidak menentu. Terry (2008) mengemukakan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

I. *Planning* (perencanaan)

Planning (perencanaan) adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif dari berbagai keputusan yang diambil. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang (Terry, 2008).

Dalam manajemen pengelolaan TPI seharusnya memiliki perencanaan yang matang dan baik karena tujuan utama didirikannya TPI adalah untuk mengelola seluruh potensi perikanan laut yang ada di sekitar daerah tempat pelelangan tersebut (Musoffan & Holis, 2020). Selain itu, TPI didirikan untuk menaikkan taraf hidup para nelayan serta tujuan utama yang paling penting didirikannya TPI adalah untuk memungut retribusi dari kegiatan pelelangan ikan guna memberikan sumbangan untuk PAD (Berkat & Nusa, 2022). Dalam penelitian ini peneliti menanyakan rencana yang dibuat untuk mengelola TPI Dobo.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa rencana yang dibuat oleh Dinas Perikanan

Kabupaten Kepulauan Aru adalah menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang perikanan guna mengelola TPI. Tujuan didirikannya TPI adalah untuk mengelola seluruh potensi perikanan laut yang ada di sekitar daerah tempat pelelangan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi untuk mengatur dan mengelola TPI (Rauf & Rachman, 2019).

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk mengelola seluruh potensi kelautan yang ada. Standar operasional prosedur adalah serangkaian intruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi dalam perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Gambar 2).

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa diperlukan waktu 60 menit untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan di TPI Dobo, namun pada kenyataannya, diperlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan jarak antara tempat pelelangan dan kantor Dinas Perikanan yang cukup jauh. Di sisi lain, segala prosesnya masih dilakukan secara manual, belum berbasis digital. Beberapa responden mengatakan bahwa hal ini menyulitkan proses input data ikan serta memberikan peluang adanya tindakan manipulasi data ikan yang masuk di TPI Dobo. Dalam suatu kegiatan perencanaan pengembangan TPI, diperlukan suatu sistem digital yang dioperasikan oleh para pegawai TPI sehingga proses pendataan ikan menjadi lebih akurat dan menghemat waktu dalam melakukan identifikasi jenis ikan di TPI (Adam et al., 2021).

Koordinator TPI mengatakan bahwa aktivitas bongkar muat dan lelang ikan mulai berkurang dan menunjukan tren yang semakin menurun. Upaya-upaya pemberian himbauan dan arahan untuk melakukan pelelangan ikan di TPI Dobo sudah diupayakan oleh koordinator namun himbauan dan pengarahan yang diberikan tidak membuat nelayan panimbang tergerak untuk menjual ikannya di TPI Dobo. Hal ini terjadi karena tingkat kesadaran nelayan untuk membayar retribusi rendah.

No	Kegiatan	PELAKSANA				Waktu
		Petugas TPI	Kepala Seksi	PPK SKPD	Kepala Dinas/Pejabat Yang Ditunjuk	
1	Pengajuan permohonan pembelian dan penjualan ikan (pelelangan)					5 menit
2	Verifikasi kelengkapan dokumen pelelangan					5 menit
3	Proses Pelelangan dan Penetapan Pembeli/Pemenang					25 menit
4	Pencetakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan SKAI					10 menit
5	Verifikasi SKRD dan SKAI					10 menit
6	Penandatanganan atau penerbitan SKRD dan SKAI					5 menit
TOTAL WAKTU PELAYANAN						60 menit

Gambar 2. SOP Pelelangan Ikan di TPI Dobo

Faktor lain yang menjadi kendala adalah belum adanya suatu perencanaan yang jelas dalam pengelolaan TPI Dobo, serta minimnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan TPI. Untuk melakukan manajemen pengelolaan TPI membutuhkan koordinator TPI yang baik dan berwawasan luas mengenai kenelayanan dan ikan guna memperoleh hasil maksimal dalam pengelolaan perikanan laut (Mardani et al., 2018). Selain itu koordinator yang berwawasan luas juga mempunyai etos kerja yang tinggi harus dimiliki oleh TPI agar mampu menciptakan manajemen yang baik juga menciptakan iklim kerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan TPI. Begitupula dengan sarana pendukung lain yang harus disediakan agar kegiatan pengelolaan TPI dapat berjalan dengan baik, cepat dan maksimal (Rahayu et al., 2017).

II. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing mencakup: membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi tugas kepada seorang koordinator untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan

penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing* (Faried & Nasution, 2018). Pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerjasama secara efektif guna mencapai tujuan bersama (Crown & Hadiwono, 2023). Pada penelitian tahap pengorganisasian juga menjadi tahapan yang paling penting dalam melakukan manajemen pengelolaan pada TPI, karena tujuan pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan pelelangan ikan salah satunya adalah memberikan arahan-arahan pada koordinator TPI Dobo dalam periode waktu tertentu.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal pemberian arahan dinilai cukup baik karena memiliki waktu yang cukup banyak dan kegiatan ini sering dilakukan. Pemberian arahan dilakukan secara langsung ke TPI Dobo, serta dilakukan juga rapat evaluasi pengelolaan TPI. Menurut informan lain, hasil rapat-rapat dan kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan serta UPT PPI/TPI belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan TPI Dobo. Hal ini terlihat dari aktivitas pelelangan ikan Dobo masih sepi dari kegiatan pelelangan ikan.

Bentuk pengorganisasian yang lain adalah

menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pengelolaan TPI (Cayhadinata et al., 2019). Komponen-komponen ini diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan pengelolaan TPI Dobo agar kegiatan pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien (Silalahi, 2006). Komponen-komponen yang harus dimiliki oleh TPI adalah pegawai pelelangan ikan, bangunan TPI serta sarana prasarana kelautan seperti dermaga. Komponen-komponen ini merupakan komponen utama dalam kegiatan pengelolaan TPI (Karimah et al., 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa TPI Dobo masih memiliki keterbatasan tenaga, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang baik dalam pengelolaan TPI Dobo. Hal ini mengakibatkan kendala dalam proses pelelangan. Kendala yang dimaksud adalah proses pelelangan yang dalam SOP berdurasi 60 menit, menjadi lebih lama dikarenakan kekurangan tenaga dan kemampuan untuk mengidentifikasi jenis ikan.

III. *Actuating* (pelaksanaan)

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang koordinator untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, serta memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi (Resti, 2012; Hizbaron & Marfai, 2019)

Dalam proses pengelolaan TPI, tidak terlepas dari berbagai masalah. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan TPI Dobo begitu kompleks sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkap masalah-masalah yang mungkin muncul dalam manajemen pengelolaan TPI Dobo. Menurut hasil wawancara, kendala utama yang dihadapi oleh TPI adalah masalah cuaca sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap pencapaian retribusi. Masalah cuaca berpengaruh kepada penerimaan retribusi karena mayoritas nelayan di Dobo tidak berani berlayar mencari ikan jika

cuaa buruk. Keselamatan para awak kapal perlu menjadi perhatian karena sangat beresiko di tengah laut. Kondisi cuaca buruk juga dapat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara diperoleh cuaca buruk yang terjadi pada bulan November dan Desember sangat berpengaruh terhadap kerja nelayan dalam mencari ikan. Apabila cuaca buruk berlangsung lama, maka nelayan tidak melakukan aktivitas melaut sehingga mengakibatkan retribusi tidak terpenuhi atau tercapai.

IV. *Controlling* (pengawasan)

Controlling ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai (Syarwani et al., 2016). *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan dapat diperbaiki agar tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas dan wewenang, dimana seluruh perubahan dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan perlu diambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan (Terry, 2008)

Dalam manajemen pengelolaan TPI Dobo, perlu ada pengawasan yang berkesinambungan agar dapat meminimalisir masalah-masalah yang ada di TPI sehingga dapat beroperasi secara maksimal. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengontrol TPI Dobo seperti yang dijelaskan oleh informan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa salah satu cara mengontrol TPI adalah dengan melakukan kunjungan kerja secara mendadak ke TPI yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru secara langsung. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan UPT PPI/TPI Dinas Perikanan

menggunakan cara kunjungan kerja dirasakan belum efektif untuk mengontrol pelaksanaan kinerja di TPI Dobo. Berdasarkan hasil wawancara, kunjungan kerja yang dilakukan tidak efektif karena kunjungan yang dilakukan tidak memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di TPI Dobo.

Cara lain untuk mengontrol TPI adalah dengan menyesuaikan karcis lelang yang sudah digunakan oleh TPI. Karcis lelang yang sudah dikeluarkan disesuaikan dengan hasil yang diperoleh dari hasil pelelangan ikan, yang kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah (Amirudin, 2014). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, manajemen pengelolaan TPI Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru belum terlaksana dengan baik. Gambaran penelitian

disajikan pada Tabel 1 berupa temuan yang diperoleh di lapangan.

Strategi Pengelolaan

Identifikasi faktor Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman pada pengelolaan TPI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tersaji pada Analisis Matriks SWOT (Tabel 2). Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui terdapat 4 faktor yang menjadi kekuatan, 6 faktor kelemahan, 6 faktor yang mejadi peluang dan 2 faktor menjadi ancaman dalam pengelolaan TPI Dobo. Untuk memperoleh strategi pengelolaan TPI Dobo, maka faktor-faktor yang telah teridentifikasi selanjutnya dilakukan persilangan dengan matriksTOWS (Tabel 2).

Tabel 1. Temuan lapangan berdasarkan kriteria dan pembahasan di TPI Dobo

No	Kriteria	Pembahasan	Temuan Lapangan
1.	<i>Planning</i> (perencanaan)	Standar oprasional prosedur pengelolaan pelelangan ikan	a) Tidak adanya peraturan khusus untuk pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru b) Keterbatasan SDM yang kompeten pada bidang TPI c) Minimnya etos kerja d) Aksesibilitas yang sulit
2.	<i>Organizing</i> (pengorganisasian)	Pemberian arahan dan penyediaan komponen Tempat Pelelangan Ikan	Adanya kunjungan kerja namun arahan yang diberikan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Dobo
3.	<i>Actuating</i> (pelaksanaan)	Kegiatan yang dilakukan seorang koordinator untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai	a) Tidak terpenuhinya target Tempat Pelelangan Ikan Dobo b) Cuaca buruk hingga kesulitan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan
4.	<i>Controlling</i> (pengendalian)	Usaha pengendalian yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Tidak ada upaya tindak lanjut dari usaha kontrol yang dilakukan sehingga menimbulkan beragam masalah dan berdampak pada retribusi TPI terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Aru

Tabel 2. Analisis Matriks SWOT dan TOWS

		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Internal		1. Potensi sumberdaya ikan	1. Lokasi TPI Dobo kurang strategis
		2. Pelabuhan Perikanan	2. Sarana yang belum memadai
Eksternal		3. Usaha dan Pemberdayaan Nelayan Kecil	3. Aktivitas bongkar muat yang semakin rendah
		4. Pelayanan Usaha	4. Belum adanya aturan yang jelas
			5. Jumlah personil operasional yang sedikit dan kurang kompeten
			6. Lemahnya sistem pengawasan
Peluang (O)		Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
1. Meningkatnya pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru	1. Meningkatkan mutu (kualitas) hasil tangkapan	1. Meningkatkan SDM pada bidang TPI	
2. Penerbitan Peraturan Daerah terkait pengelolaan TPI Dobo	2. Merumuskan tata kelola pengelolaan TPI Dobo dengan kepastian hukum	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan	
3. Permintaan pasar yang tinggi terhadap hasil perikanan		3. Pengembangan sarana pendukung	
4. Peran dan dukungan pemerintah dalam anggaran pembangunan TPI Dobo		4. Menarik investor swasta melalui profil investasi penangkapan ikan	
5. Terdapat kelembagaan nelayan (Koperasi atau Asosiasi)			
6. Peluang investasi di sektor perikanan tangkap			
Ancaman (T)		Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
1. Iklim dan cuaca yang buruk	1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan	1. Mengembangkan program kemitraan antar berbagai pihak dalam pengelolaan TPI	
2. Masuknya pemodal besar yang melakukan transaksi di laut			

Berdasarkan hasil analisis TOWS diperoleh 8 strategi pengelolaan TPI Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, yakni;

1. Meningkatkan mutu (kualitas) hasil tangkapan;
2. Merumuskan tata kelola pengelolaan TPI Dobo dengan kepastian hukum;
3. Meningkatkan SDM pada bidang TPI;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan;
5. Pengembangan sarana pendukung;
6. Menarik investor swasta melalui profil investasi penangkapan ikan;
7. Mengoptimalkan fungsi pengawasan;

8. Mengembangkan program kemitraan antar berbagai pihak dalam pengelolaan TPI.

Berdasarkan hasil analisis dengan AHP untuk menentukan strategi yang harus diprioritaskan, maka diperoleh nilai *Consistency Ratio* (CR = 0,07) berada di bawah ambang nilai < 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa para responden memberikan nilai pembobotan pada masing-masing kriteria dengan tingkat penyimpangan yang kecil. Hasil analisis lanjut memperlihatkan bahwa ada 3 strategi dari 8 strategi yang teridentifikasi dengan TOWS yang dapat dijadikan prioritas untuk mengoptimalkan

pengelolaan TPI Dobo yaitu kepastian hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil analisis strategi prioritas pengelolaan TPI Dobo dengan metode AHP

Prioritas	Strategi Pengelolaan	Bobot
I	Merumuskan tata kelola pengelolaan TPI Dobo dengan kepastian hukum	0,561
II	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	0,246
III	Pengembangan sarana pendukung	0,193
		CR = 0,07

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan TPI Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru belum terlaksana dengan baik. Terdapat 8 strategi pengelolaan yang diperlukan untuk pengembangan pengelolaan TPI Dobo dimana 3 diantaranya merupakan prioritas yaitu merumuskan tata kelola pengelolaan TPI Dobo dengan kepastian hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

Selain strategi pengelolaan yang dikemukakan di atas, disarankan adanya program kemitraan untuk memberdayakan masyarakat nelayan sekitar dan untuk memaksimalkan fungsi TPI Dobo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamsz, J. & Wurlianty, B. (2015). Dinamika Kelembagaan Dalam Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Konsuden Kabupaten Seram Bagian Timur. *Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura.
- Abrahamsz, J., Makailipessy, M. & Thenu, I. (2018). Dinamika Kelembagaan dan Implikasinya dalam Pengelolaan Perikanan Kepiting Bakau di Ohoi Evu Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, *X*(1), 53-61. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.53-61>
- Adam, S. I. A., Celsia, F. K. & Katuuk, N. T. (2021). Aplikasi Pelelangan Ikan Online (E-Lelang) Berbasis Mobile. *J. Sistem dan Teknologi Informasi*, *IX*(2): 1-5. <http://doi.org/10.26418/justin.v9i2.43973>
- Aji, F. B., Wisnaeni, F. & Herawati, R. (2016). Fungsi dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Pati Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. *Diponegoro Law Journal*, *V*(1), 1-8. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10787>
- Amirudin, S. (2014). Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai Sarana Pelayanan Publik. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, *30*(2):253-261. <http://doi.org/10.29313/mimbar.v30i2.671>
- Berkat, Y. J., & Nusa, B. Y. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pomako Kabupaten Mimika. *Journal Of Economics And Regional Science*, *II*(2): 1-16. <http://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v2i2.215>
- Cahyadinata, I., Fahrudin, A., Sulistiono & Kurnia, R., (2019). "Household Welfare Of Mud Crab Fishermen In Small Outermost Islands. Case Study: Enggano Island, Bengkulu Province, Indonesia. *AACL Bioflux*, *XII*(2), 31-42.
- Crown, N. E. & Hadiwono, A. (2023). Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Atraktor dan Fasilitas Hiburan Kota. *Jurnal STUPA*, *V*(1), 17-26. <http://doi.org/10.24912/stupa.v5i1.22630>
- David, M. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi.
- Fariad, I. A. & Nasution, D. P. (2018). Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Kajian Ekonomi*, *III*(2), 11-27. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288788>
- Fitri, H. K., Suherman, A. & Boesono, H. (2021). Strategi pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI) Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *J. Sosek KP*. *16*(2):207-223. <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.10091>
- Handoko, H., T. (1989). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Penerbit FE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- Hizbaron, R., D. & Marfai M. A. (2019). *Arahan Pengembangan Kawasan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Karimah, S. R., Mudzakir, A. K. & Sardiyatmo, S. (2019). Analisis Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus : TPI Dadap, Glayem, Karangsong, Eretan Wetan, dan Eretan Kulon). *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, VIII(1), 18-24.
- Lopulalan, Y., & Abrahamsz, J. (2023). Kelembagaan Sasi Lompa dan Implikasinya (Studi Kasus Dinegeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah). *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, XIX(1), 52-63. <https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page52-63>
- Mardani, I. F., Mardiana, A., & Junaidi, T. (2018). Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Wilayah Tpi Tegalsari, Kota Tegal Jawa Tengah. *Jurnal Kelautan*, XI(1): 38-46. <http://doi.org/10.21107/jk.v11i1.3114>
- Musoffan, & Holis, M. (2020). Studi Kelayakan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Branta Sebagai Pasar Ikan Wisata Bahari Di Pamekasan. *Jurnal Sosek KP*, XV(2), 199-212. <http://doi.org/10.15578/jsekp.v15i2.7825>
- Nadia, D., & Suning. (2014). Studi Penataan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juanda Berbasis Cluster. *Jurnal Teknik Waktu*, XII(2), 1-11. <http://doi.org/10.36456/waktu.v12i2.863>
- Nirmasari, D. & Bibin, M. (2022). Strategi peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan* 2(1): 29-37. <http://doi.org/10.55678/jikan.v2i1.640>
- Nurwasih. (2021). *Peran Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan*. <https://media.neliti.com/media/publications/223024-peran-keberadaan-tempat-pelelangan-ikan.pdf>
- Rahayu, S., Jayusman & Romadi (2017). Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan Tahun 1998-2014. *Journal of Indonesian Histori*, VI(1): 55-65
- Rauf, F. & Rachman, E. (2019). Kemampuan Petugas Pengelola dalam Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, VI(1): 9-15.
- Resti, F. D. (2012). Pengukuran Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di PPI Muara Angke. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, I(1), 83-98.
- Silalahi, D. (2006). *Aktivitas Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan, Kelurahan Pelabuhan-ratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sinaga, L., Zulkarnaini & Hendrik. (2020). Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, I(4): 57-63
- Suryani, M. (2020). *Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Wilayah Pulau Baai, Kota Bengkulu*. Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Syamsuddin. (2019). Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Sosial Dan Politik*, IX(2). <http://doi.org/10.47030/aq.v9i2.74>
- Syarwani, A., Mahyudin, I. & Mahreda, E. S. (2016). Kajian Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sentra Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Enviro Scienteae*, XII(2), 69-77. <http://dx.doi.org/10.20527/es.v12i2.1683>
- Terry, G. R. (2008). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (Edisi Bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung